

PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN BAGI KELOMPOK PKK DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEDUG BANYUMAS

**Yunita Ratna Sari¹, Fitriatun Sururiyah², Khairunnisa Arifin³, Zahrul Umam⁴, Septi
Wulandari⁵, Tania Rahayu⁶**

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

⁴Sejarah Peradaban Islam, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

⁵Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

⁶Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

email: yunitaratna36@uinsaizu.ac.id

Abstract: Women's political participation is an important aspect in sustainable village development. However, the involvement of women including the PKK group in Ledug village, Kembaran sub-district, Banyumas faces obstacles ranging from a lack of understanding of political participation, village development, low education levels, time constraints, and traditional mind-sets. This community service activity aims to increase the understanding, capacity, and political participation of women in the PKK group in Ledug village, Kembaran sub-district, especially in the village development process. The methods used include FGD, direct observation, counseling, and village forum simulations. The results of the activity show that the PKK Ledug group has a high motivation to be involved in village development but still faces obstacles such as limited information regarding village political mechanisms and lack of self-confidence. After the community service was implemented, the PKK Ledug group was able to convey aspirations in a more structured manner. The village forum simulation showed an increase in the activeness of the PKK Ledug group in discussions and submitting program proposals. This community service proves that political awareness can be an effective strategy to increase the contribution of the PKK Ledug group in village development.

Keywords: women's political participation; village development

Abstrak: Partisipasi politik perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, keterlibatan Perempuan termasuk kelompok PKK di desa Ledug kecamatan Kembaran, Banyumas menghadapi hambatan mulai kurangnya pemahaman tentang partisipasi politik, pembangunan desa, tingkat Pendidikan rendah, kendala waktu, pola pikir yang masih tradisional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, partisipasi politik perempuan kelompok PKK di desa Ledug, kecamatan Kembaran terutama proses Pembangunan desa. Metode yang digunakan meliputi FGD, observasi langsung, penyuluhan, simulasi forum desa. Hasil kegiatan menunjukkan kelompok PKK Ledug memiliki motivasi tinggi untuk terlibat dalam pembangunan desa tapi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan informasi terkait mekanisme politik desa, minimnya kepercayaan diri. Setelah pengabdian dilaksanakan, kelompok PKK Ledug dapat menyampaikan aspirasi secara lebih terstruktur. Simulasi forum desa memperlihatkan peningkatan keaktifan kelompok PKK Ledug dalam berdiskusi, mengajukan usulan program. Pengabdian ini membuktikan bahwa penyadaran politik dapat menjadi strategi efektif dapat meningkatkan kontribusi kelompok PKK Ledug dalam Pembangunan desa.

Kata kunci: partisipasi politik perempuan; pembangunan desa

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak pedesaan di seluruh Nusantara tetapi kemiskinan kerap terjadi di wilayah-wilayah pedesaan. Kondisi ini sangat memprihatinkan sebab di pedesaan terdapat kekayaan alam yang melimpah (Fauziah Lubis dan Yusniah, 2020). Berdasarkan data BPS menjelaskan presentase penduduk miskin perkotaan Maret 2025 sebesar 6,73 persen naik dibandingkan September 2024 sebesar 6,66 persen. Sementara itu, presentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen menurun dibandingkan September sebesar 11,34 persen (bps.go.id, 2025). Meskipun terdapat penurunan jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun, tetapi tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Selain kemiskinan pedesaan, tantangan lainnya berkaitan dengan minimnya akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga membuka celah untuk korupsi. Dibuktikan dengan data KPK melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 sebanyak 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50 persen diantaranya merupakan oknum kepala desa (Gusti Grehenson, 2025). Untuk mengatasi berbagai tantangan di pedesaan dibutuhkan peran desa harus disertai dengan tindakan nyata pemerintah desa wajib mempraktikkan asas akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap kegiatan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka (Lestari dan Yuliana, 2025).

Adapun tujuan pembangunan desa antara lain terpenuhinya keperluan pokok, ekspansi sarana dan prasarana desa, berkembangnya keunggulan ekonomi lokal, pendayagunaan sumber

daya alam berkesinambungan (Kiki Endah, 2015). Untuk mewujudkan pembangunan desa yang optimal wajib melibatkan partisipasi perempuan karena bagian dari masyarakat yang mengetahui secara langsung kebutuhan, persoalan serta potensi sosial ekonomi di tingkat keluarga dan komunitas. Keterlibatan perempuan bukan hanya memenuhi prinsip inklusivitas, namun juga meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan pembangunan desa.

Kabupaten Banyumas menempati posisi kedua dengan jumlah perempuan paling banyak di Jawa Tengah sebesar 897.032 orang tahun 2022 dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Akan tetapi Indeks TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) perempuan paling rendah sebanyak 47,91 (Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Kecamatan Kembaran mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lain di Banyumas yakni Kembaran Extravaganza sebuah acara tahunan rutin merupakan kreativitas masyarakat yang menampilkan berbagai potensi desa beserta budaya. Alasan pengabdi memilih desa Ledug sebagai lokasi pengabdian yaitu jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Kembaran dengan luas wilayah relatif sempit. Penduduk di desa Ledug tahun 2023 sebanyak 12.402 jiwa terdiri atas 6.274 perempuan sementara 6.128 laki-laki. Pengabdi menjadikan kelompok PKK sebagai sasaran pengabdian karena partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pembangunan desa masih rendah. PKK di desa Ledug sudah ada sejak tahun 2018 sampai sekarang. Namun, keterlibatan ibu-ibu PKK hanya terbatas pada pertemuan rutin bulanan, belum pada pembangunan desa. Ditambah lagi, kelompok PKK di Ledug tid-

ak pernah mendapat sosialisasi pentingnya partisipasi politik baik dari Badan Pengawas Pemilu dan KPU kabupaten Banyumas. Mereka memperoleh penyuluhan dibidang kesehatan seperti PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), imunisasi, upaya mengatasi *stunting*.

Beberapa kajian sebelumnya yang dipandang sinkron dalam pengabdian ini di antaranya yakni pertama, (Anita Marianata dkk, 2022) mengemukakan pendidikan politik memberikan dampak positif bagi SMAN 1 Kota Bengkulu mencakup menambah wawasan terhadap siswa, mendorong siswa-siswi sebagai pemilih pemula lebih aktif menyampaikan aspirasi. Kedua, (Utaminingsih dkk, 2023) menyampaikan rendahnya keikusertaan warga di desa Ciseeng, Bogor dipengaruhi minimnya edukasi mengenai pendidikan politik.

Fokus pengabdian ini yaitu peningkatan partisipasi politik terutama perempuan di tingkat desa sebagai bagian terkecil dalam struktur pemerintahan desa dengan sasaran kelompok PKK di desa Ledug kecamatan Kembaran dikaitkan dalam pembangunan desa. Alasan yang mendasari tim pengabdi memilih kelompok PKK Ledug sebagai sasaran pengabdian karena ibu-ibu PKK Ledug belum pernah memperoleh penyuluhan tentang partisipasi politik, pembangunan desa. Mereka hanya memperoleh sosialisasi bidang kesehatan seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu pertama, FGD (*Focus Group Discussion*) dengan kelompok PKK Desa Ledug pada 8 September 2025 di Balai Desa Ledug untuk menggali kebutuhan, presepsi,

hambatan partisipasi perempuan yang dihadapi oleh kelompok PKK Ledug. Kedua, observasi langsung terhadap dinamika peran kelompok PKK di desa Ledug dalam kegiatan desa pada 3 September 2025 dengan Ketua PKK Ledug. Ketiga, penyuluhan mengenai hak politik perempuan, peran kelompok PKK Ledug dalam pembangunan desa serta mekanisme musyawarah desa pada 28 September 2025. Keempat, simulasi forum desa sebagai bentuk latihan praktis pengambilan keputusan pada 26 Oktober 2025. Peserta FGD terdiri dari pengurus dan anggota PKK di desa Ledug, Kecamatan Kembaran

PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi lapangan, FGD dan wawancara pengurus PKK Ledug, beberapa masalah utama yang menghambat partisipasi politik perempuan di desa Ledug sebagai berikut:

Rendahnya pemahaman tentang politik dan pembangunan desa, Banyak perempuan di desa Ledug yang memahami politik hanya sebatas kegiatan pemilihan umum, belum melihat bahwa politik juga mencakup penyusunan program, musyawarah desa (musdes) serta pengambilan keputusan pembangunan. Dibuktikan dengan FGD pengambilan data awal pada 8 September 2025, hanya sebagian kecil anggota PKK Ledug yang mengetahui tahapan pembangunan desa seperti musyawarah desa, APDes. Ketika ditanya tentang siapa yang berhak mengajukan usulan pembangunan desa, mayoritas peserta FGD menjawab peranagkat desa bukan masyarakat termasuk perempuan. Wawancara awal dengan anggota PKK Ledug, apabila ditanya mengenai politik

jawabnya pemilu. Urusan pembangunan desa biasanya sudah diatur oleh perangkat desa. Yang perlu diketahui, masyarakat di Ledug masih mengalami kesulitan dalam memberikan suara pada TPS ketika pemilu hingga pilkades. Dari wawancara awal dengan anggota PKK Ledug menyiratkan presepsi politik masih sempit. Lebih lanjut dari hasil pre test saat sosialisasi menjelaskan hanya 25 % peserta yang mengetahui bahwa hasil musyawarah desa masuk dokumen RKPDes dan 70 % peserta mengira perempuan tidak mempunyai peran langsung dalam pengambilan keputusan.

Dalam FGD yang telah dilaksanakan oleh pengabdi, sebagian besar peserta yang terdiri dari kelompok PKK Ledug menyatakan pertama, kelompok PKK Ledug hanya menerima informasi program setelah keputusan desa ditetapkan bukan terlibat dalam proses penyusunan. Kedua, kelompok PKK Ledug belum memahami bahwa mereka memiliki hak suara untuk menyampaikan usulan dalam musyawarah desa, ketiga beberapa kelompok PKK Ledug berpendapat program desa dianggap sebagai ranah laki-laki sehingga mereka tidak perlu terlibat. Minimnya partisipasi dalam forum desa. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ibu Budi Risdianti, S.Sos pada tanggal 2 September 2025, pukul 10.00 WIB di Balai Desa Ledug mengatakan jumlah yang hadir dalam musrembangdes dari kelompok PKK hanya 5 orang, kadang 3 orang atau bahkan hanya ketua PKK Ledug saja yang hadir. Hal itu menandakan keterlibatan perempuan masih rendah dalam forum desa.

Faktor yang menjadi penyebab antara lain pertama, dominasi peran domestik dan minimnya waktu berpartisipasi. Sebagian besar kelompok

PKK Ledug mengutamakan pekerjaan rumah tangga sehingga merasa tidak mempunyai cukup waktu untuk hadir dalam forum desa. Terbukti dengan data dari profil desa Ledug tahun 2023, jumlah ibu-ibu yang mengurus rumah tangga sebanyak 2.117 orang menempati posisi kedua dalam klasifikasi pekerjaan. Posisi pertama ditempati oleh belum atau tidak bekerja sebanyak 2.525 orang.

Kedua, minimnya akses informasi tentang program desa informasi mengenai agenda musyawarah desa, penyusunan RKPDes atau forum pembangunan seringkali tidak tersampaikan secara merata kepada kelompok perempuan. Hasil FGD dengan kelompok PKK Ledug menunjukkan informasi hanya disampaikan ke ketua PKK tingkat desa lalu penyebarannya tidak merata ke PKK dusun atau ranting. Ada anggapan juga urusan musyawarah desa adalah urusan laki-laki, sehingga perangkat desa tidak memprioritaskan penyebaran informasi ke kelompok perempuan atau PKK Ledug.

Untuk mengatasi masalah diatas, tim pengabdian telah melakukan beberapa strategi antara lain 1) melakukan penyuluhan mengenai konsep partisipasi politik perempuan, hak politik dalam konteks desa serta tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi musyawarah dusun, musyawarah desa, RKPDes, APBDes. Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa Ledug yang dihadiri ibu-ibu PKK sebanyak 50 orang. Untuk memperdalam materi, pengabdi mengundang narasumber dari dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman yaitu ibu Chanifia Izza Millata, S.IP, M.IP yang memaparkan materi sekitar partisipasi politik perempuan secara interaktif. Sehingga, ada feedback dari

ibu-ibu PKK yang antusias menanyakan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, 2) melakukan workshop peningkatan kapasitas dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa Ledug yang dihadiri 50 ibu-ibu PKK Ledug. Guna mewujudkan workshop peningkatan kapasitas yang berkualitas, pengabdi mengundang narasumber dari dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman bernama Neneng Sobibatu Rohmah, S.Sos, M.IP. Rangkaian workshop peningkatan kapasitas dimulai dengan adanya pemamparan materi dari narasumber terkait politik dalam pembangunan desa, penyusunan peta masalah perempuan desa, penguatan peran organisasi PKK, hak politik perempuan serta simulasi forum desa. Setelah narasumber selesai memaparkan materinya, peserta workshop yakni ibu-ibu PKK Ledug mempraktikan forum musyawarah desa dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok, kemudian dibuat sesi latihan penyampaian usulan dalam waktu 3-5 menit, fasilitator memberikan feedback berkaitan penyampaian isi usulan, dilanjukan dengan diskusi cara menghadapi penolakan dan memperkuat argumen, 3) melakukan FGD bersama Kelompok PKK Ledug dilaksanakan 8 September 2025, pukul 09.00 di Balai Desa Ledug dihadiri 30 orang. Tujuan FGD ini antara lain menggali masalah partisipasi politik perempuan di Ledug, mengidentifikasi hambatan dalam berpartisipasi politik, menyepakati mekanisme penyampaian aspirasi perempuan yang lebih sistematis. Selama FGD, peserta diminta mencatat pengalaman, kendala mereka terkait keterlibatan dalam musyawarah desa dan proses pembangunan desa. Semua

pendapat dituliskan dalam kertas plano. Setelah daftar masalah terkumpul, peserta memberi tanda centang pada poin yang dianggap penting. Kemudian, fasilitator memandu, peserta mengaitkan masalah partisipasi politik dengan hambatan komunikasi, teknis selama ini yang mereka hadapi. Selanjutnya, tahapan kelompok kecil dengan membagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan satu tema yakni peran dalam musyawarah desa.

Hasil diskusi lalu dipresentasikan dan disepakati bersama sebagai temuan FGD. Poin-poin yang dicatat oleh pengabdi dari hasil FGD terdiri atas 1) informasi agenda musyawarah desa sering tidak tersampaikan kepada seluruh anggota PKK Ledug hanya disampaikan ke Ketua PKK Ledug dan peserta mengusulkan papan informasi kegiatan desa khusus perempuan. Selanjutnya, ibu-ibu PKK yang mengikuti FGD mengakui kebingungan terkait alur perencanaan pembangunan desa. Dari segi kebutuhan representasi formal dalam musyawarah desa hanya diwakili sedikit anggota PKK Ledug sehingga sebatas undangan saja belum menjadi bagian tetap dalam struktur musyawarah desa. Kelompok PKK Ledug mengusulkan adanya perwakilan wajib dalam setiap forum perencanaan desa. Segi kebutuhan mekanisme aspirasi yang terstruktur, ibu-ibu PKK di desa Ledug merasa usulan perempuan seringkali tidak masuk prioritas. Hasil FGD mengusulkan adanya formulir usulan perempuan, kotak aspirasi PKK, pencatatan aspirasi melalui sekretaris PKK tingkat desa di Ledug untuk disampaikan kepada pemerintah desa.



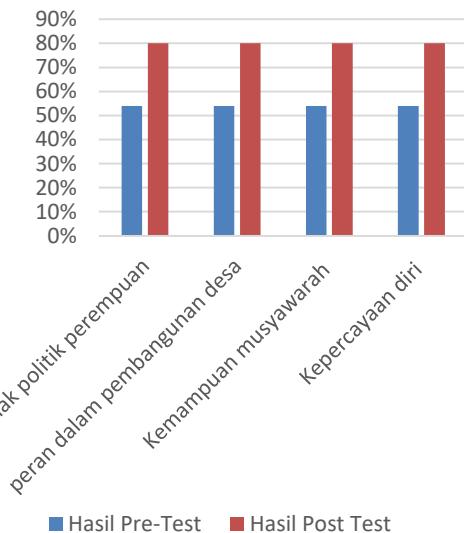
Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Simulasi forum desa

Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim pengabdi memberikan dampak positif bagi kelompok PKK Ledug yaitu ibu-ibu PKK Ledug mulai paham tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Dibuktikan dengan hasil pre test dan post test yang telah dilakukan oleh pengabdi. Sebelum adanya penyuluhan dari narasumber dan simulasi forum desa, tingkat pemahaman politik ibu-ibu PKK Ledug sebesar 54 persen. Setelah adanya penyuluhan mengalami peningkatan menjadi 80 persen.

Hasil Pretest dan Post Test Kelompok PKK Ledug



Gambar 3. Pre test dan post test

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman politik perempuan bagi kelompok PKK di desa Ledug, kecamatan Kembaran. Melalui metode FGD, observasi, penyuluhan, simulasi forum desa ditemukan bahwa kelompok PKK Ledug memiliki minat tinggi untuk terlibat dalam pembangunan desa tetapi masih terkendala kurangnya informasi, kepercayaan diri. Setelah penyuluhan dan simulasi forum desa, kelompok PKK Ledug mampu memahami hak politik, cara menyampaikan aspirasi, pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anita Marianata dkk. (2022). Memberikan Pendidikan Politik Pada Siswa Sekolah Menengah

- Atas Negeri 1 Kota Bengkulu. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan*, 2(2), 125. From <https://ejournal.unib.ac.id/jurnalinovasi/article/view/21256>
- Agus Afandi dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.
- Anwar Arifin. (2015). *Prespektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- bphn.go.id. (2020).
- BPK. (2018, Maret 15). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. From <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72791/uu-no-2-tahun-2018>
- BPS.2025. Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen. From <https://www.bps.go.id/id>
- Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Profil Gender Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*. Jawa Tengah: Dinas Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
- Eko Handoyo Dan Puji Lestari. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fernandes Simangunsong dan Imelda Hutasoit. (2018). *Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat*. Malang: Inteligensia Media.
- Grehenson, Gusti.2025. Marak Penyelewengan Dana Desa, Pakar UGM Himbau Masyarakat Ikut Mengawasi. From <https://ugm.ac.id/id/berita/marak-penyelewengan-dana-desa-pakar-ugm-himbau-masyarakat-ikut-mengawasi/>
- Kiki Endah. (2015). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera. *MODERAT (Modern Dan Demokratis)*, 1(4), 677. From <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/issue/view/312>
- Nila Kusuma dkk. (2023). Keterlibatan Perempuan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Sapit Kecamatan Suela). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 82. From <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/223>
- Ningsih Widiah Lestari dan Lingga Yuliana. 2025. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 Di Desa Sowanlor, Jepara. *MASMAN: Master Manajemen*, 3, (2), 84. From <https://ejournal-nipamof.id/index.php/MASMAN>
- Ramlan Subakti. (2013). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Retno Herningrum Pratiwi. (2022, Juni 1). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. From <http://lib.unnes.ac.id>
- Sri Utaminingsih dkk. (2023). Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Negara Di Desa Kuripan Ciseeng Bogor. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 181. Diambil kembali dari <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/10510>

Tiffany Shahnaz Rusli dkk. (2024).
Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Wangsih. (2024). *Pendidikan Politik Dalam Dinamika Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Yalvema Miaz. (2012). *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP Press.

Yusniah dan Fauziah Lubis.(2020).Konsep

Implementasi Smart Village.Bandung : CV.Media Sains Indonesia